

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI FUNGSI REHABILITASI DAN PENERBITAN SKHPN DI BNN PROVINSI JAWA TIMUR

Angel Tehupuring¹, Supri Hartono²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

angelinatehupuring1904@gmail.com, suprihartono@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Magang merupakan salah satu bentuk pembelajaran praktik lapangan yang bertujuan untuk menghubungkan teori akademik dengan implementasi di dunia kerja. Penulis melaksanakan kegiatan magang di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur (BNNP Jatim), khususnya pada bidang rehabilitasi dan pelayanan pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN). Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kerja serta mengevaluasi kontribusi kegiatan tersebut dalam mendukung pelayanan publik, khususnya dalam penanganan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasi dan partisipasi aktif selama magang. Hasilnya menunjukkan bahwa pelayanan di bagian rehabilitasi dan SKHPN BNNP Jatim telah menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima seperti akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan SDM dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal.

Kata kunci : Pelayanan publik, rehabilitasi, SKHPN, BNNP Jatim, administrasi negara.

ABSTRACT

Internships are a form of practical field learning designed to bridge academic theory with real-world implementation. This article is based on an internship experience at the East Java Provincial National Narcotics Agency (BNNP Jatim), particularly in the rehabilitation services and issuance of the Certificate of Narcotics Examination Results (SKHPN). The purpose of this study is to describe the workflow and evaluate the contribution of these services in enhancing public service quality, especially in the context of drug abuse prevention and treatment. A qualitative descriptive method was used through observation and active participation during the internship period. The results show that the rehabilitation and SKHPN services have implemented key principles of public service, including accountability, transparency, and efficiency. However, some challenges remain, such as limited human resources and suboptimal use of digital technologies. These findings highlight the important role of public administration students in supporting and improving government services through field involvement.

Keywords: Public service, rehabilitation, SKHPN, BNNP East Java, public administration.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia, termasuk di wilayah Provinsi Jawa Timur. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan implikasi sosial, ekonomi, dan hukum yang luas. Oleh karena itu, upaya pemberantasan dan penanggulangan narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga menuntut peran aktif lembaga-lembaga pelayanan publik seperti Badan Narkotika Nasional (BNN).

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur (BNNP Jatim) merupakan salah satu instansi vertikal yang memiliki tugas dalam pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka menanggulangi masalah narkoba di tingkat daerah. Dua fungsi penting yang dijalankan oleh BNNP Jatim adalah layanan rehabilitasi bagi pengguna narkotika serta penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) sebagai bentuk pelayanan administratif kepada masyarakat.

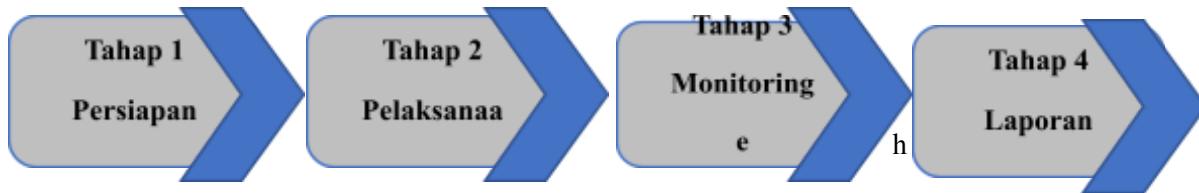
Sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, penulis melaksanakan kegiatan magang di BNNP Jatim untuk memperoleh pengalaman langsung mengenai implementasi kebijakan publik serta dinamika pelayanan publik di instansi pemerintah. Fokus magang pada bidang rehabilitasi dan pembuatan SKHPN membuka ruang pembelajaran bagi penulis untuk terlibat aktif dalam proses pelayanan, sekaligus mengamati bagaimana prinsip-prinsip administrasi publik diterapkan dalam praktik lapangan.

Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman praktis dalam mendukung proses administrasi layanan SKHPN serta pendampingan klien rehabilitasi, yang kemudian menjadi dasar penulisan artikel ilmiah ini. Kegiatan magang ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam menghubungkan teori administrasi negara dengan praktik penyelenggaraan layanan publik, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Jenis kegiatan yang dilakukan penulis yaitu magang reguler yang bersifat kelompok dilaksanakan selama 40 hari kerja, terhitung sejak tanggal 3 Februari hingga 9 April 2025. Pelaksanaan magang reguler sendiri dilaksanakan penulis di BNNP Jawa Timur yang beralamat di Jalan Sukomanunggal No.55-56, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, Jawa Timur 60188. Penulis ditempatkan di bagian pelayanan dasar yang bertugas memberikan dukungan pendampingan layanan penerbitan SKHPN (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika). Penulis melakukan kegiatan tersebut dengan rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin – Kamis mulai pukul 07.30 – 16.00 WIB, kecuali pada hari Jumat yaitu pukul 07.30 - 16.30 WIB. Pada saat Ramadhan ada sedikit perubahan jadwal yaitu pada hari Senin sampai Kamis pukul 08.00 – 15.00 WIB, kecuali hari Jumat yaitu pukul 08.00 – 15.30 WIB. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin mengajukan penerbitan SKHPN.

Metode merupakan pola atau cara berfikir untuk melakukan sesuatu. Dalam suatu penelitian, metode digunakan dalam mengkaji atau menganalisis untuk menyelesaikan permasalahan maupun untuk mencapai tujuan dari rencana yang telah disusun. Pada kegiatan magang ini, penulis menggunakan metode pelaksanaan yang dibagi menjadi 4 tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi, serta tahap pelaporan. Metode yang digunakan dalam penulisan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengatasi studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Firdaus, 2017).



Penulis akan menggunakan instrumen kunci metode pelaksanaan 4 tahapan ini untuk menyusun artikel. Pada setiap metode pelaksanaan yang diklasifikasikan menjadi 4 tahapan memiliki kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda, sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilaksanakan pada 3 hingga 7 Februari 2025. Pada tahap ini, penulis melakukan koordinasi awal dengan pihak BNNP Jatim, mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan SKHPN dan rehabilitasi, serta menyusun rencana kerja magang. Penulis juga mengikuti pengarahan umum dan pengenalan lingkungan kerja sebagai bekal sebelum terlibat langsung dalam pelayanan. persiapan menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memastikan kegiatan pendampingan berjalan lancar dan terarah. Pada tahap ini, dilakukan koordinasi awal dengan pihak Klinik Pratama Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Timur guna memperoleh informasi lengkap terkait alur layanan penerbitan SKHPN, standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan, serta hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi dalam proses pelayanan.

2) Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan, berlangsung dari 10 Februari hingga 3 April 2025. Pada tahap ini, penulis terlibat aktif dalam berbagai aktivitas pelayanan . Kegiatan pendampingan dimulai dengan membantu masyarakat memahami langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses penerbitan SKHPN seperti membantu proses pendaftaran, pemeriksaan administrasi pemohon SKHPN, pengisian formulir, pengambilan urine, serta pendampingan asesmen awal bagi klien rehabilitasi. Penulis juga turut menginput data ke sistem pelayanan, mengarsipkan dokumen, dan memberikan edukasi langsung kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan. Kehadiran penulis sebagai mahasiswa magang turut mendukung kelancaran proses pelayanan dengan memberikan bantuan administratif dan mempercepat alur kerja harian.

3) Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara sistematis untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pendampingan dan tingkat perubahan yang terjadi dalam proses layanan penerbitan SKHPN. Monitoring dilaksanakan setiap hari selama kegiatan berlangsung dengan melakukan observasi langsung terhadap alur layanan, mencatat jumlah masyarakat yang berhasil mendapatkan pelayanan lebih cepat, serta mencatat masalah-masalah yang muncul di lapangan. Evaluasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner sederhana kepada masyarakat yang telah mendapatkan layanan, untuk mengukur tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan yang telah didampingi. Selain itu, diadakan sesi wawancara singkat dengan petugas administrasi untuk menggali masukan terkait kendala dan perubahan positif yang dirasakan selama proses pendampingan. Data yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi ini kemudian dianalisis untuk menilai keberhasilan program pendampingan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

4) Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pada tahap ini, seluruh hasil pelaksanaan kegiatan, temuan selama pendampingan, data monitoring dan evaluasi, serta analisis capaian kegiatan disusun dalam sebuah laporan resmi. Laporan tersebut mencakup latar belakang kegiatan, tujuan, metode pelaksanaan, hasil kegiatan, pembahasan temuan, kesimpulan, serta saran untuk pengembangan layanan SKHPN di Klinik Pratama. Selain itu, laporan dilengkapi dengan dokumentasi foto kegiatan, form monitoring, dan hasil kuesioner evaluasi sebagai lampiran pendukung. Laporan disusun secara sistematis dan diserahkan kepada pihak Klinik Pratama BNNP Jawa Timur serta pihak kampus sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas pelaksanaan luaran magang. Penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran di masa mendatang, baik bagi klinik maupun bagi program pengabdian masyarakat yang serupa di tempat lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan magang yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur (BNNP Jatim) memperlihatkan karakteristik mitra pengabdian yang khas, yaitu sebagai lembaga vertikal pemerintah pusat yang memiliki fungsi pelayanan publik di bidang pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Subjek atau mitra dalam kegiatan ini adalah Klinik Pratama BNNP Jawa Timur yang berada di bawah koordinasi Bidang Rehabilitasi. Klinik ini menjadi titik sentral pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya dalam dua bidang utama: layanan rehabilitasi bagi pengguna narkotika dan layanan administratif berupa penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN).

Subjek pelayanan terdiri dari dua kelompok utama, yaitu klien rehabilitasi dan pemohon SKHPN. Klien rehabilitasi mayoritas berasal dari kalangan remaja dan dewasa muda, baik yang datang secara sukarela, rujukan keluarga, maupun atas dasar permintaan dari lembaga hukum. Mereka umumnya mengikuti layanan asesmen dan konseling untuk pemulihan dari ketergantungan narkoba. Sementara itu, pemohon SKHPN didominasi oleh masyarakat umum, khususnya dari kalangan pelamar kerja, peserta seleksi pendidikan kedinasan, dan masyarakat yang memiliki keperluan hukum. Dalam hal ini, klinik menjadi penghubung penting antara negara dan warga negara dalam menjamin hak atas layanan pemeriksaan kesehatan terkait narkotika.

Kegiatan pendampingan yang dilakukan penulis selama masa magang menunjukkan bahwa kedua layanan tersebut telah berjalan sesuai standar, namun masih memiliki berbagai kendala dalam penerapannya. Dalam pelayanan rehabilitasi, proses asesmen dan pendampingan berjalan melalui pendekatan empatik, namun terbatasnya jumlah konselor dan sarana pelayanan menjadi hambatan dalam efektivitas jangka panjang. Di sisi lain, pelayanan SKHPN memiliki struktur alur kerja yang sudah jelas dan sistematis, tetapi masih menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administratif serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.

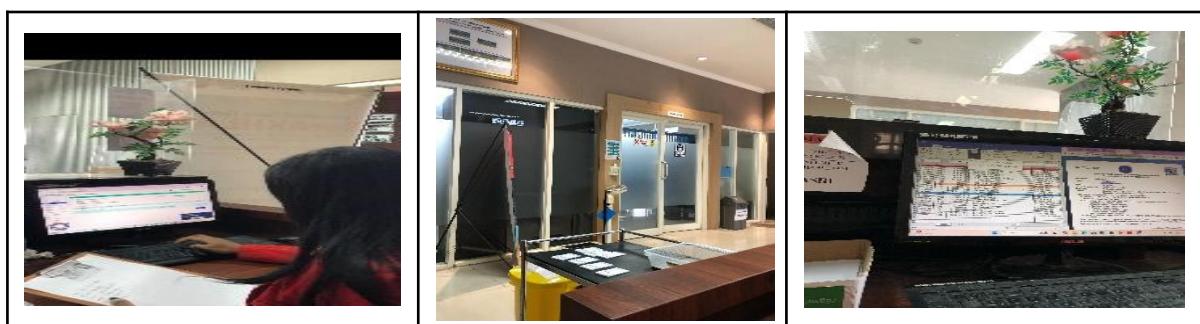
Secara umum, mitra kegiatan menunjukkan karakteristik sebagai lembaga yang responsif dan terbuka terhadap keterlibatan pihak eksternal, termasuk mahasiswa magang. Hal ini tercermin dari kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk terlibat langsung dalam proses pelayanan, mulai dari verifikasi dokumen hingga edukasi kepada masyarakat. Mitra juga menunjukkan semangat perbaikan berkelanjutan melalui evaluasi layanan harian dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Berdasarkan pengamatan tersebut, pembahasan terhadap hasil kegiatan ini dapat ditinjau melalui teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Model ini

menekankan pentingnya enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar pelaksana, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, dan lingkungan sosial. Dalam konteks pelayanan SKHPN dan rehabilitasi di BNNP Jatim, beberapa aspek telah menunjukkan kesesuaian dengan teori tersebut, seperti struktur birokrasi yang sudah jelas dan disposisi pelaksana yang tinggi. Namun, aspek sumber daya manusia dan komunikasi kepada masyarakat masih menjadi titik lemah yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

Penemuan ini sejalan dengan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Husna dan Prabawati (2019), yang menyebutkan bahwa implementasi layanan publik di sektor narkotika memerlukan pendekatan kolaboratif antara petugas, pemohon layanan, dan komunitas. Namun, berbeda dengan hasil pengabdian lain yang menekankan pentingnya pendekatan hukum dalam penanggulangan narkotika, kegiatan magang ini lebih menekankan pada pendekatan pelayanan yang humanistik dan administratif. Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan di BNNP Jatim mendukung semangat reformasi birokrasi yang menempatkan pelayanan publik sebagai bagian dari hak dasar warga negara.

Dari pembahasan ini dapat diinterpretasikan bahwa kualitas pelayanan publik di BNNP Jawa Timur dapat ditingkatkan melalui penyempurnaan aspek teknis dan non-teknis. Secara teknis, digitalisasi pelayanan dan penguatan sistem antrean online menjadi kebutuhan mendesak. Sedangkan secara non-teknis, edukasi masyarakat dan pelatihan komunikasi petugas menjadi strategi yang perlu dilakukan secara konsisten. Implementasi kebijakan akan berjalan maksimal jika tidak hanya dilihat dari sisi aturan dan struktur formal, tetapi juga dari praktik keseharian yang menjunjung nilai kemanusiaan dan partisipasi publik.



Gambar 2. Pelayanan Penerbitan SKHPN

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa keberadaan SOP menjadi dasar penting untuk menjaga konsistensi dan kualitas layanan penerbitan SKHPN di Klinik Pratama BNNP Jawa Timur. Namun, dalam praktiknya, tidak semua tahapan SOP dapat diterapkan secara sempurna akibat faktor internal dan eksternal. Secara internal, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan ruang pelayanan, serta sistem manual yang masih digunakan, menjadi hambatan dalam mempercepat alur pelayanan sesuai SOP. Sedangkan secara eksternal, pemohon layanan sering kali kurang memahami persyaratan yang harus dipenuhi, tidak membaca informasi layanan yang sudah tersedia, dan datang tanpa persiapan yang memadai. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi SOP sangat bergantung tidak hanya pada kesiapan penyelenggara, tetapi juga pada partisipasi aktif dan kesiapan dari pengguna layanan.

Mengacu pada teori implementasi kebijakan, dalam hal ini kebijakan pelayanan publik, faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sangat memengaruhi efektivitas penerapan SOP di lapangan. Pada Klinik Pratama, komunikasi SOP kepada masyarakat masih belum maksimal, karena informasi layanan seringkali hanya dipasang dalam bentuk papan pengumuman sederhana

yang kurang menarik perhatian. Padahal, untuk mendukung efektivitas implementasi SOP, penyampaian informasi harus dilakukan dengan lebih kreatif dan intensif, misalnya melalui brosur sederhana, spanduk, video pendek di ruang tunggu, atau bahkan penguatan informasi lewat media sosial resmi BNNP.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, analisis terhadap implementasi layanan penerbitan SKHPN ini dapat dikaitkan dengan teori proses implementasi kebijakan, di mana seringkali tantangan utama berasal dari pihak pemohon yang kurang memahami prosedur administratif yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan temuan di Klinik Pratama BNNP Jawa Timur, di mana tingkat ketidaktahuan masyarakat terhadap persyaratan dan alur pelayanan menjadi faktor penghambat utama kelancaran implementasi layanan. Proses implementasi kebijakan layanan ini menghadapi tantangan komunikasi dan koordinasi, baik di internal penyelenggara layanan maupun antara penyelenggara dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Rendahnya literasi administrasi dari masyarakat pemohon memperlihatkan pentingnya peran petugas layanan untuk memperkuat komunikasi yang lebih efektif agar kebijakan layanan dapat diterima dan dijalankan sesuai dengan tujuan awalnya.

Untuk menganalisis lebih lanjut kualitas layanan yang diberikan di Klinik Pratama BNNP Jawa Timur, penulis menggunakan teori kualitas pelayanan yang dikembangkan oleh Zeithaml dan Bitner (2000). Menurut mereka, kualitas layanan dipengaruhi oleh tiga dimensi utama, yaitu: service product (produk layanan), service environment (lingkungan layanan), dan service delivery (penyampaian layanan). Ketiga dimensi ini saling berkaitan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap mutu pelayanan yang mereka terima.

1. Pertama, dari segi service product, atau produk layanan yang disediakan oleh Klinik Pratama, terdapat dua layanan utama yakni pelayanan rehabilitasi dan penerbitan SKHPN. Kedua layanan ini secara substansi telah menjawab kebutuhan masyarakat. SKHPN sebagai dokumen resmi dibutuhkan untuk berbagai keperluan administratif, dan layanan rehabilitasi menjadi bagian dari perlindungan negara terhadap warga yang terdampak narkotika. Namun, dalam praktiknya, produk layanan ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat luas, sehingga menimbulkan kesalahpahaman mengenai prosedur dan fungsinya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk layanan harus diimbangi dengan edukasi dan kejelasan informasi.
2. Kedua, aspek service environment atau lingkungan pelayanan mencakup fasilitas fisik, kenyamanan ruang tunggu, ketersediaan informasi visual, serta kebersihan lingkungan klinik. Berdasarkan observasi selama magang, fasilitas yang tersedia sudah mencukupi, tetapi belum optimal. Ruang asesmen terbatas, ruang tunggu sering penuh pada jam sibuk, dan informasi layanan yang tersedia hanya terpajang dalam bentuk spanduk atau papan informasi sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan SOP telah sesuai, kualitas lingkungan pelayanan perlu ditingkatkan agar mampu menciptakan suasana pelayanan yang lebih nyaman dan informatif.
3. Ketiga, dari sisi service delivery atau penyampaian layanan, petugas di Klinik Pratama menunjukkan sikap kooperatif, ramah, dan terbuka terhadap masyarakat. Proses interaksi antara petugas dan pemohon umumnya berjalan baik, terutama dalam memberikan penjelasan prosedur. Namun, keterbatasan jumlah petugas menyebabkan pelayanan melambat pada saat jumlah pemohon meningkat. Selain itu, belum adanya sistem antrean elektronik atau pendaftaran daring juga memengaruhi kelancaran proses pelayanan. Penyampaian layanan yang baik membutuhkan sistem pendukung yang efisien dan memadai agar tidak membebani kinerja petugas dan kenyamanan pemohon.

Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan di Klinik Pratama BNNP Jawa Timur telah menunjukkan upaya perbaikan dan komitmen terhadap pelayanan publik, namun masih terdapat ruang yang cukup besar untuk peningkatan, khususnya dalam aspek fasilitas fisik dan sistem pelayanan. Penerapan dimensi service product, service environment, dan

service delivery perlu terus disempurnakan agar pelayanan yang diberikan tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga memenuhi harapan masyarakat dalam hal kecepatan, kenyamanan, dan kepastian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui program magang di Klinik Pratama BNNP Jawa Timur bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang rehabilitasi dan penerbitan SKHPN. Berdasarkan hasil pendampingan dan pengamatan selama magang, dapat disimpulkan bahwa kedua layanan tersebut telah dijalankan sesuai dengan prosedur standar (SOP) yang berlaku. Meskipun demikian, kualitas pelayanan belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek lingkungan pelayanan dan sistem penyampaian informasi kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan serta terjadinya penumpukan antrean pada waktu-waktu tertentu.

Secara umum, BNNP Jawa Timur menunjukkan komitmen dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dengan pendekatan humanistik, inklusif, dan akuntabel. Interaksi antara petugas dan masyarakat berjalan cukup baik, tetapi memerlukan penguatan dari sisi fasilitas, teknologi informasi, dan edukasi layanan. Berdasarkan teori kualitas layanan menurut Zeithaml dan Bitner (2000), dimensi produk layanan, lingkungan layanan, dan penyampaian layanan masih memerlukan perbaikan agar dapat memenuhi ekspektasi masyarakat secara menyeluruh. Hasil ini memperkuat pentingnya kolaborasi antara mahasiswa, institusi pendidikan, dan instansi pemerintah dalam memperbaiki mutu layanan publik secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, I. (2017). *De Jure De Jure*. 17(740), 429–443.
- Kristaung, R., & Tj, D. I. (2006). Kajian Teoritis Model Kualitas Jasa. In *Jurnal Kompetensi Manajemen Bisnis* (Vol. 1, Issue 1).
- Rahmidiani, N., 1✉, H., & Rossevelt, F. A. (N.D.). *Kapasitas Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (Bnnp) Sumatera Utara Dalam Implementasi Rehabilitasi Bagi Pecandu Dewasa*.
- Rizky Utami, D. (N.D.). *Collaborative Governance Dalam Pengendalian Narkoba Antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat*.
- Wisnu Setyawan Adyka Putra, W., & Astuti, P. (N.D.). *Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (Bnnp) Jawa Timur Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya*. <Http://Dprd.Jatimprov.Go.Id/Berita/Id/6128/Pengguna-Narkoba-Di->